

Resolusi Konflik melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong di Kota Ambon

Conflict Resolution toward Local Wisdom Approach of Pela Gandong in Ambon City

Hendry Bakri

Magister Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin
hendrybakri@ymail.com

Abstract

This paper aims to describe about the conflict in Ambon, Maluku within the period of 1999-2004. Conflict resolution is done in addition to mediation through the Malino agreement, also carried out using local wisdom Pela Gandong which is the bond of two or three more villages that have pledged to work together irrespective of differences in ethnicity, religion and race. Pela Gandong is then cultivate a spirit of reconciliation among the community.

Keywords: *Conflict Resolutin, Local Wisdom, Pela Gandong, Ambon City*

A. Pendahuluan

Manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial, senantiasa akan berinteraksi dengan manusia lain dalam upaya mewujudkan kebutuhan hidupnya melalui pola-pola perilaku. Sedangkan manusia sebagai makhluk Politik "Zoon Politicon" dalam interaksinya tidak lepas dari keterlibatan dalam hubungan yang bersifat politis. Aristoteles mengatakan "politik merupakan hakikat keberadaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat." (Rudy, 2003:1)

Hal yang ditunjukkan dari proses kehidupan bersama (*collective life process*) masyarakat tidak lain beresensikan kemandirian, kesukarelaan, kemampuan mengorganisasikan diri untuk memperjuangkan

kepentingan bersama, dan ketaatan masyarakat terhadap aturan main yang berupa norma dan hukum yang berlaku dalam sistem politik lokal. Namun masyarakat yang pluralis dalam interaksinya tidak selalu berjalan baik, dalam interaksi sosial sering kali terjadi persinggungan sehingga menimbulkan konflik sosial. Menurut Watkins, konflik terjadi karena terdapat dua pihak yang bertikai dan keduanya yang potensial dapat saling menghambat. Konflik terjadi akibat terjadinya perbedaan kepentingan diantara komunitas masyarakat. (Chandra, 1992:20)

Penyelesaian konflik tidak bisa terpisahkan dari rekonsiliasi, karena rekonsiliasi merupakan salah satu tahap resolusi konflik yaitu proses *peace building*. Rekonsiliasi merupakan suatu terminologi ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses terbuka dan membagi proses penyelesaian konflik dalam beberapa tahap sesuai dengan dinamika siklus konflik. Suatu konflik sosial harus dilihat sebagai suatu fenomena yang terjadi karena interaksi bertingkat berbagai faktor. Terakhir, resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara optimal jika dikombinasikan dengan beragam mekanisme penyelesaian konflik lain yang relevan. Suatu mekanisme resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara efektif jika dikaitkan dengan upaya komprehensif untuk mewujudkan perdamaian yang langgeng. Menurut Ralf Dahrendorf penyelesaian konflik yang efektif sangat bergantung pada tiga faktor. Pertama, kedua pihak harus mengakui kenyataan dan situasi konflik diantara mereka. Kedua, kepentingan yang diperjuangkan harus terorganisir sehingga masing-masing pihak memahami tuntutan pihak lain. Ketiga, kedua pihak menyepakati aturan main yang menjadi landasan dalam hubungan interaksi diantara mereka.

Bangunan sosial dan Kultural komunitas di Ambon pada umumnya merupakan contoh empiris yang paling aktual dari aksi kolektif yang berkelanjutan dalam kaitannya dengan membangun basis penghidupan hubungan kekerabatan. Dalam pelaksanaan secara lokal telah membentuk suatu sistem kekeluargaan untuk mempererat persatuan antar komunitas di Ambon. Pranata-pranata dan organisasi lahir dari sejarah sosial dan budaya serta politik antar-desa atau antar-kekerabatan telah menjadi panduan dan hukum adat yang mampu menjamin ketertiban hubungan sosial di antara anggota masyarakat. Tatanan dan pranata adat inilah yang menjadi benteng pertahanan bagi penghidupan hubungan persaudaraan dari masyarakat lokal di Ambon. Norma-norma yang membatasi pilihan-pilihan dari individu egoistis yang hanya berusaha memaksimalkan kepentingannya sendiri, dan juga dapat memainkan peran penting dalam membentuk prefensi-prefensi individu. Norma sosial memiliki akibat positif, yakni membantu merangkai harapan-harapan individu dan memperkuat rasa saling percaya. Ada konsep kunci utama dari berbagai macam tatanan adat dan sosial yang mendasari hubungan persaudaraan di Ambon, Konsep itu dikenal dengan *pela gandong*. *Pela gandong* merupakan suatu relasi hubungan darah dan perjanjian antara satu negeri dengan negeri lain baik yang terjalin antara negeri-negeri sedaratan dan berlainan pulau, juga antara etnis dan agama yang berbeda. Hubungan *pela gandong* ini mempunyai efek yang sangat penting dimana semua masyarakat turut serta menjunjung kebersamaan dan menjaga hubungan tersebut.

Pela gandong mengandung arti hubungan kekerabatan meski berbeda agama. Dapat pula diartikan hidup berdampingan dengan penuh tenggang rasa dalam perbedaan agama, tetapi tidak saling mempengaruhi untuk masuk dan memeluk suatu agama tertentu. Pola hidup bersaudara ini adalah kerangka umum budaya lokal yang menjadi acuan bagi pertumbuhan perilaku mulai dari rumah, keluarga dan masyarakat. Nilai-nilai yang melekat pada pola hidup orang bersaudara seperti inklusivitas, kebersamaan, tolong-menolong (gotong-royong) dan sebagainya, adalah unsur perekat masyarakat Ambon yang khas karena memiliki justifikasi dalam adat dan tata kehidupan tradisional sebagai suatu kearifan lokal. Proses penyelesaian konflik dengan menggunakan pendekatan dan sistem lokal sesungguhnya dapat dikatakan bahwa ajaran dalam

sistem *pela gandong* pada hakekatnya nenek-moyang, para leluhur masyarakat Ambon telah mengajarkan dan mempraktekkan pola kehidupan yang pluralis dan heterogenis. Terpetik dari berbagai informasi yang diperoleh menimbulkan optimisme, bahwa sistem *pela gandong* saat ini masih berperan penting. Rasa persatuan dan identitas bersama disadari dan dihayati dengan kuat upacara-upacara pembaharuan *pela (upacara panas pela)* masih sering berlangsung.

Peranan *pela gandong* semakin memberikan ruang untuk rekonsiliasi semakin tercipta, di mana segredasi antar wilayah yang tadinya memisahkan dua komunitas penduduk sekarang sudah semakin terbuka. Khazanah budaya peninggalan para leluhur yakni *pela gandong* semakin merekatkan tali silaturahmi yang sempat terputus. Penyembuhan luka batin setelah konflik berlangsung secara alamiah atas inisiatif masyarakat karena adanya kekerabatan atau persaudaraan itu. Proses rekonsiliasi konflik di Ambon dalam kerangka kerja adat tradisional, tentu saja hanya sebagian dari bentuk penyelesaian. Struktur masyarakat Ambon akan tetap terkoyak jika tidak ada penyelesaian politik untuk menghentikan konflik.

Atas pemikiran tersebut maka perlu dilakukan revitalisasi dan penataan kembali *pela gandong* antar desa di Kota Ambon agar dapat berfungsi efektif sebagai pedoman bagi warga masyarakat dalam menjaga hubungan persaudaraan dan meminimalisir konflik yang terjadi. Pelembagaan *pela gandong* sebagaimana adanya ditangan lembaga-lembaga adat yang independen cenderung bisa menciptakan perdamaian dan rekonsiliasi bagi masyarakat lokal di Kota Ambon.

A. Metode Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Provinsi Maluku yang terjadi Konflik SARA. Namun karena Provinsi Maluku memiliki wilayah yang cukup luas dan merupakan provinsi kepulauan maka dengan pertimbangan tersebut, lokasi penelitian dilaksanakan di kota Ambon sebagai ibu kota Provinsi Maluku. Kota Ambon sebagai pusat awal mula terjadinya konflik dan juga sebagai ikon perdamaian rekonsiliasi konflik Maluku. Lokus penelitian di desa Batu merah dan desa Passo yang merupakan dua desa yang *berpela gandong* dan keduanya berbeda agama.

Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. "Fenomenologi mempercayai bahwa realitas adalah hasil konstruksi sosial dan realitas juga merupakan hasil berbagi pengalaman berinteraksi antara satu orang dengan orang lain". (Irawan, 2006). Sedangkan tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif analisis.

Data yang diperoleh melalui lapangan atau daerah penelitian dari hasil wawancara mendalam dengan informan dan observasi langsung. Peneliti turun langsung ke Kota Ambon sebagai daerah konflik SARA dengan lokus penelitian Negeri yang memiliki *ikatan pela gandong* salah satunya : Negeri Batu Merah dan Negeri Passo untuk mengumpulkan data dalam berbagai bentuk, seperti rekaman hasil wawancara dan foto kegiatan di lapangan.

Narasumber	Jabatan
Pdt.Dr. Chr.Ruhlessin,M.Si	Ketua MPH Sinode GPM
Drs. H. Idris. Latuconsina	Sekretaris umum MUI Provinsi Maluku
Libeli.SH	Basat Reskrim Pulau Ambon dan Pulau Lease
Dra. D. Noijsa	Kasubag Otpda Kesbangpol Kota Ambon
Pdt.Jacky Manuputty	Ketua Kesbang GPM/Delegasi Kristen untuk
Justus Patipawae	Malino
H. Awath Ternate	Direktur Institut Tifa Damai Maluku
Marthen Sarmanella	Raja Negeri Batu Merah
	Raja Negeri Passo

B. Hasil dan Pembahasan

Konflik ini bermula dari konflik biasa dari kedua orang kebetulan berbeda agama. Dari beberapa sumber bermula dari perkelahian antara supir dan keneknya di pasar Mardika. Oleh karena terpancing emosi maka terjadilah konflik besar antara masyarakat Mardika dan Masyarakat Batu Merah. Seperti yang diungkapkan oleh Libeli: *“Awal terjadinya konflik, awal kejadian oleh karena penganiayaan sopir oto (mobil angkutan), awalnya ini kriminal murni,tapi karena termakan isu maka larinya ke SARA,apalagi bertepatan dengan lebaran orang Islam, 19 januari 1999, ”*. Ketegangan berubah menjadi kebencian, pada akhirnya kebencian mendesak orang-orang yang tidak sabar untuk mengangkat senjata saling menyerang. Pengkotakan masyarakat ke dalam pembagian Islam dan Kristen mempermudah dan memperlancar tindak kebencian. Ini seperti di ungkapkan Justus Patipawae: *“Konflik di Ambon menandai indikasi lemahnya spririt agama sebagai kekuatan civil society yang pro kemanusiaan.*

Konflik yang terjadi di Ambon pada Januari 1999, melahirkan isu-isu diskriminatif dengan lahirnya istilah *“BBM”* (Buton, Bugis, Makassar) dimana terjadi diskriminatif dan pengusiran terhadap warga pendatang, konflik agama Islam-Kristen, hingga kerusuhan tindakan separatis RMS, dengan lahirnya FKM/RMS yang dinilai sebagai bibit baru RMS. Konflik yang terjadi di Kota Ambon rentang waktu tahun 1999 hingga 2003 adalah konflik Agama. Pembakaran Mesjid dan Gereja pun banyak yang terjadi. Konflik SARA memuncak ketika terjadi pembakaran Mesjid Annur dan Gereja Silo di Kota Ambon bertepatan Natal 2001 yang dikenal dengan sebutan *“Natal berdarah”*. Konflik Ambon mulai meluas dengan isu keterlibatan Laskar Jihad dan FKM/RMS dalam konflik Ambon. Seperti yang dikatakan Chr. Ruhlessin *“Selanjutnya beta (saya) mau bilang issu agama, issue Laskar Jihad serta FKM/RMS adalah ekse dari konflik yang menambah energi konflik. Issue – issue tersebut membuat orang lupa akan tangan raksasa yang mendesain konflik ini.”* Penumpukan kekuatan terutama yang bersifat politis dengan muatan agama atau politisasi agama yang terjadi, harus dapat dikendalikan secara bijak oleh semua pihak. Hal ini disebabkan, penumpukan kekuatan tersebut sangat tidak fungsional dengan kebutuhan pembangunan dalam kerangka memfasilitasi terwujudnya tatanan masyarakat madani yang demokratis. Sentimen atau emosi massa yang primordialistik hanya akan merupakan untuk kepentingan orang-perorangan atau kelompok tertentu saja.

Setiap budaya memiliki kearifan-kearifan tersendiri dalam menyikapi permasalahan hidup yang dihadapi, termasuk di dalamnya kearifan dalam menyelesaikan konflik. Kearifan-kearifan seperti inilah yang sering disebut sebagai kearifan lokal (*local wisdom*). Upaya penyelesaian konflik SARA di Kota Ambon sudah dilakukan berbagai pihak dengan bentuk yang beragam. Hal ini seperti

yang diungkapkan oleh Jacky Manuputty:

“Ada proses hukum, intervensi pemerintah secara politik dilakukan tapi juga ada lewat lembaga agama, melalui kearifan lokal melalui proses yang sangat panjang, baik secara tertutup melalui gerakan bawah tanah untuk perdamaian, ataupun secara langsung dengan dialog antar berbagai elemen masyarakat. Namun ada juga bentuk penyelesaian berdasarkan inisiatif masyarakat” Hal senada juga diungkapkan oleh Justus Patipawae: *“Proses resolusi konflik Ambon telah dilakukan berbagai dengan mekanisme yang berbeda, melalui jalur adat orang Ambon, jalur agama, hingga mekanisme yang difasilitasi oleh pemerintah.”*

Kearifan Lokal merupakan sebuah kebudayaan yang mengacu pada pelbagai kekayaan budaya itu sendiri, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dikenali, dipercayai, dan diakui sebagai elemen penting yang mampu mempertebal kohesi sosial di antara warga masyarakat. Kearifan lokal apabila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan nilai-nilai budaya yang baik yang ada di dalam suatu masyarakat. Hal ini berarti, untuk mengetahui suatu kearifan lokal di suatu wilayah maka kita harus bisa memahami nilai-nilai budaya yang baik yang ada di dalam wilayah tersebut.

Cara penyelesaian konflik lebih tepat jika menggunakan model-model penyelesaian yang disesuaikan dengan kondisi wilayah serta budaya setempat. Ideal apabila penyelesaian tersebut dilakukan atas inisiatif penuh dari masyarakat bawah yang masih memegang teguh adat lokal serta sadar akan pentingnya budaya lokal dalam menjaga dan menjamin keutuhan masyarakat. Dalam tahapan penyelesaian konflik, Jhon Burton memasukan penyelesaian bernuansa kultural, ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di masyarakat juga dapat diselesaikan dengan cara budaya serta adat istiadat yang dianut masyarakat setempat. Menyelesaikan konflik dengan menggunakan adat lokal atau kearifan lokal dapat dikatakan efektif karena selama ini sudah membudaya dan mengakar serta menjadi pedoman dalam masyarakat. Seperti yang diungkapkan Jacky Manuputty:

“Tidak ada yang salah dengan kearifan lokal tapi semata karena politisasi agama berkembang cukup pesat. Ketika peran agama tak mampu selesaikan konflik, kearifan lokal justru efektif mempersatukan masyarakat yang tercerai-berai berdasarkan komunitas agama”.

Oleh karena kearifan lokal adalah sesuatu yang sudah mengakar dan biasanya tidak hanya berorientasi sosial semata, tetapi juga berorientasi sakral sehingga pelaksanaannya bisa lebih cepat dan mudah diterima oleh masyarakat. Kearifan lokal dapat dijadikan resolusi konflik, sehingga perdamaian bisa cepat terwujud, bisa diterima semua kelompok sehingga tidak ada lagi konflik laten yang tersembunyi dalam masyarakat. Chr Ruhullessin mengungkapkan:

“Di Maluku ada orang Islam asli Maluku, ada juga orang Kristen asli Maluku yang mengerti kearifan lokal dan dan kultur kemalukuan, karena itu kita tidak tergantung pada model penyelesaian konflik yang dilakukan pemerintah tapi kita menggunakan pola kultural yang dimengerti masyarakat kita, yaitu pela gandong”.

Pola penyelesaian konflik perspektif masyarakat Ambon dimaksud adalah proses penyelesaian konflik dengan menggunakan pendekatan dan sistem kekerabatan atau istiadat orang Ambon. Sistem kekerabatan ini dikenal dengan istilah *pela gandong*. Kata “pela” berasal dari kata “Pila”, yang berarti buatlah sesuatu untuk kita bersama-sama. Kadang-kadang kata *pila* diberi akhiran “tu” menjadi *pilatu*. *Pilatu* berarti menguatkan, mengamankan atau mengusahakan sesuatu benda tidak mudah rusak atau pecah. Kemudian berubah artinya yaitu dari sesuatu usaha untuk mengamankan atau menyelamatkan. *Gandong*, secara harafiah diterjemahkan sebagai “berasal dari rahim yang sama,” sehingga mereka percaya memiliki leluhur yang sama (kandung), Seperti juga yang diungkapkan Jacky Manuputty: *“Gandong adalah relasi kekerabatan berdasarkan*

hubungan geneologis darah, sedangkan pela adalah pakta sosial yang diangkat oleh dua atau lebih desa yang berbeda berdasarkan peristiwa tertentu.”

Maka *pela gandong* adalah ikatan perjanjian oleh dua atau desa baik berbeda agama berdasarkan hubungan darah garis keturunan kedua atau lebih desa di Kota Ambon. Cara-cara seperti ini telah dimiliki dan dilaksanakan masyarakat di Kota Ambon sejak ratusan tahun silam, diawali para leluhur, kemudian secara turun-temurun berlaku sampai sekarang. Seperti contoh hubungan *pela gandong* Negeri Batu Merah dan Negeri Passo.

Sekitar tahun 1509 Sultan Ternate melebarkan kekuasaannya di Pulau Ambon. Raja-raja di setiap negeri di kota Ambon dititahkan untuk membayar upeti kepada Sultan Ternate setiap tahun. Diantara *kora-kora Patalima* dari Passo dan *kora-kora Patasiwa* dari Batu Merah. Ketika dalam perjalanan pulang ke pulau Ambon di tanjung Keramat Pulau Buru, *kora-kora* orang Passo dihantam oleh gelombang dan tenggelam. *Kora-kora* orang Batu Merah pun yang kebetulan lewat pun segera membantu orang Passo. Dalam proses wawancara, H. Awath mengungkapkan: “*Karena tenggelam semua perbekalan orang Passo pun hanyut dibawa gelombang. Bekal orang Batu Merah berupa sagu kering, ikan asar, dan kelapa pun dibagi dua dan dimakan bersama oleh warga Passo dan Batu Merah*”. Orang Passo pun membalikan batu karang besar, lalu mereka mengangkat sumpah :

“Demi Allah yang menguasai jagat raya ini, kami bersumpah mulai saat ini, kami mengangkat orang-orang Batu Merah sebagai pela kakak kandong e dan berlanjut sampai generasi penerus kami dan bila batu karang ini terbalik seperti semula, maka barulah putus hubungan kami.”

Dalam hubungan *pela gandong* tersebut terdapat perjanjian antara dua negeri yaitu:

1. *Orang Passo dan orang Batu Merah tidak boleh baku kawin.*
2. *Orang Passo dan orang Batu Merah tidak boleh baku musuh.*
3. *Orang Passo dan Orang Baru Merah harus saling tolong menolong satu sama lain.*

Hubungan *pela gandong* yang terjadi antara Negeri Passo dan Negeri Batu Merah sekiranya menunjukkan ikatan persaudaraan yang begitu kuat di antara masyarakat Ambon. Ikatan saling tolong menolong dengan saling menghargai sudah melekat sejak dulu kala. Hal ini dibenarkan oleh Marthen Sarimanella:

“Orang Passo umumnya mayoritas agama Kristen, sedangkan Batu Merah mayoritas Islam, jadi ini bisa dibilang hubungan persaudaraan antara Negeri Sarani (Kristen) deng Negeri Salam (Islam) yang sudah ada sejak tete nene moyang (leluhur).”

Wujud keterikatan budaya ini secara praktis terlihat dari sifat kegotongroyongan antara kedua negeri yang mempunyai hubungan *pela gandong*. Sifat kegotong royongan ini sampai masuk ke wilayah identitas sensitive suatu kelompok, misalnya dalam hal ini pembangunan rumah ibadah. Menurut D. Noiija dalam wawancara diungkapkan:

“Hubungan ini ada antar desa islam dengan islam, Kristen dengan Kristen, dan juga islam dengan Kristen. Tujuan pela gandong adalah sebagai alat perekat untuk menjaga hubungan antar desa tadi. Dulu sebelum kerusuhan, kalau orang Islam mau bangun Mesjid, orang Kristen membantu, begitu sebaliknya kalau orang Kristen mau bikin Gereja pasti orang Islam bantu.”

Maka jika dilihat dari prespektif jaringan negeri-negeri di Kota Ambon masih dapat dihubungkan satu dengan yang lain, menjadi salah faktor penting bagi terciptanya integrasi sosial yang kokoh. Pada umumnya di Kota Ambon perbedaan agama sering dikalahkan dengan kuatnya ikatan kekerabatan yang menganut sistem patrelinial atau garis keturunan ayah. Setiap keluarga menganut agama tertentu, namun ada juga yang berbeda agama dan mereka dapat menjalankan ibadahnya secara damai. Sebagai contoh pada saat kerusuhan tokoh Negeri Passo dan Batu Merah

yang *berpela gandong* berkomunikasi secara langsung untuk menghindari perluasan ketegangan konflik di wilayah mereka. Hal ini juga diungkapkan H.Awath:

“Waktu konflik di kota pemuda dari Batu Merah mau pigi turun bantu perang, tapi bapa raja sebelum beta (saya), antua (beliau) suruh kalau dong (kalian) berani beta perintah pigi serang Passo, akhirnya pemuda dari sini seng pigi (tidak pergi) bantu perang” Seperti juga yang diutarakan Theresia Maitimu, *“jika ada permasalahan mengenai kedua desa ini (Passo-Batu Merah) diangkat, kami langsung dapat menanganinya, sehingga tidak terjadi tindak kekerasan”*

Pada hakikatnya *pela gandong* telah mengandung unsur rekonsiliasi. Dalam *pela gandong* itu sendiri dinyatakan bagaimana ikatan yang kuat dalam menjalin kedamaian antar Negeri-Negeri yang memiliki ikatan *pela gandong*. Nilai-nilai sosial budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Ambon merupakan salah satu modal dasar bagi peningkatan persatuan dan kesatuan termasuk menyemangati masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di daerah ini pasca konflik Hubungan-hubungan kekerabatan adat dan budaya harus terus didorong sehingga dapat menciptakan sinergitas yang andal bagi upaya bersama membangun Ambon di masa mendatang. Realita sejarah menunjukkan bahwa sistem *pela gandong* selain mampu mendamaikan problematika kehidupan masyarakat, akan tetapi pernah juga jatuh dalam himpitan modernisasi sosial politik, ekonomi dan agama di negeri ini baik secara *internal* maupun *eksternal*. Jacky Manuputty mengungkapkan:

“Untuk itu dibutuhkan suatu proses revitalisasi pela gandong dan juga reaktualisasi di situasi sekarang, pela gandong dan semangat pela gandong bisa dikembangkan sebagai etika sosial dalam relasi masyarakat secara menyeluruh”

Modernitas secara perlahan dapat mengikis sendi-sendi kehidupan masyarakat lokal. Masyarakat lokal menjadi kehilangan jati diri dan mengabaikan nilai lokal sebagai pedoman hidup. Sifat kebersamaan luntur perlahan menjadi sikap egoistik yang mementingkan kepentingan pribadi. Keegoisan yang ditimbulkan dapat menjadi pemicu konflik. Libeli mengatakan

“Ada perkumpulan raja-raja yang mengayomi dan mengcover isu, sehingga jika ada isu yang pribadi bisa di tangkis dan tidak di bawa ke isu yang lebih besar untuk memicu konflik”

Kesadaran akan pentingnya nilai budaya sehingga dibentuklah *Majelis Latupati* Kota Ambon. Majelis Latupati Kota Ambon adalah sebuah wadah kumpulan Kepala Pemerintah Negeri “Adat” dengan gelar “Raja”, yang berada di wilayah kota Ambon. Inisiatif ini dimulai dari sebuah tragedi sosial yang terjadi di kota Ambon, kerukunan beragama, sejarah siwalima, silsilah orang basudara, hubungan kekerabatan adat, dan berbagai pranata sejarah yang memupuk kerukunan dan kedamaian hidup mulai goyah akibat konflik.

Menurut Gubernur Maluku, Karel Albert Ralalalu, Majelis Latupati dapat dijadikan sebagai model kebersamaan dalam keberagaman di Maluku. Para Latupati adalah tokoh-tokoh adat yang memiliki kharisma dan bertanggung jawab untuk menegakan nilai-nilai persaudaraan dan melaksanakan fungsi penyeimbang, membangun harmonisasi dan mencegah serta mengatasi konflik yang ada

Dengan adanya rekomendasi nomor: 03/R/Mubes-I/MLM/2007 tentang pembentukan Majelis Latupati di tingkat Kabupaten/Kota, maka para latupati kota Ambon yang selama ini telah banyak berproses untuk menciptakan perdamaian dan difasilitasi oleh Institut Tifa Damai Maluku segera membentuk Majelis Latupati Kota Ambon.

Dalam posisi seperti ini, fungsi yang satu dengan fungsi lainnya tidak akan saling bertabrakan tetapi berinteraksi fungsional untuk mengembangkan kehidupan komunitas lokal. Menjadikan *pela gandong* sebagai pendekatan penyelesaian konflik adalah dimana harus ada

usaha inisiatif masyarakat Ambon sendiri untuk melakukan konsolidasi budaya *pela gandong*. Ke arah ini dibutuhkan dua tahap konsolidasi, yaitu:

1. Tahap konsolidasi internal, dimana mobilisasi sosial diperrankan oleh para tokoh adat, masyarakat dan agama pada setiap komunitas, Islam maupun kristen. Kondolidasi dimaksudkan untuk melakukan penggalian terhadap kualitas *pela gandong* dan bagaimana upaya konkrit untuk memelihara dan menjadikannya sebagai khazanah perekat hubungan saling membutuhkan antar dua komunitas yang berbeda kampung, desa atau negeri dalam merenda masa depan. Konsolidasi pada tahap ini dilakukan secara parsial atau interen komunitas secara terpisah, baik Kristen maupun Islam.
2. Tahap konsolidasi eksternal, dimana setiap komunitas berinisiatif untuk saling bertemu. Baik Islam maupun Kristen mengutus delegasinya yang terdiri dan tokoh adat, masyarakat dan agama untuk membicarakan upaya konsolidasi budaya *pela gandong*.

Jika proses konsolidasi *pela gandong* berjalan baik, maka akan muncul inisiatif bersama antara masyarakat dari komunitas berbeda agama dan pemerintah Kota Ambon serta pemerintah Provinsi untuk melakukan perbaikan-perbaikan sarana sosial secara bergandengan tangan. Bukan tidak mungkin, upaya dari konsolidasi tersebut akan mengembalikan *pela gandong* dalam maknanya yang holistik, dimana orang muslim dengan suka rela membantu saudaranya yang kristen dalam membangun gereja atau sebaliknya orang kristen juga dengan suka rela membantu saudaranya yang muslim dalam pembangunan masjid dan seterusnya. Itulah lukisan damai masyarakat Ambon sebenarnya dalam bingkai khazanah kearifan lokal *pela gandong*.

Kearifan lokal *pela gandong* memiliki pengaruh positif terhadap penyelesaian konflik SARA di Kota Ambon. Namun resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara optimal jika dikombinasikan dengan beragam mekanisme penyelesaian konflik lain yang relevan.

C. Kesimpulan

Kerusuhan yang terjadi di Kota Ambon dan tempat-tempat lain di Maluku, merupakan sebuah hasil rekayasa dan sudah *disetting* untuk tujuan tertentu, antara lain merusak tatatan kultur masyarakat Ambon, dan merusak sistem perekonomian dan sistem pendidikan di Kota Ambon. Konflik horisontal mempunyai potensi yang besar untuk merobek kedamaian dan mengoyak stabilitas. Konflik ini diwarnai oleh dominannya faktor kesukuan, agama atau keduanya sekaligus yang muncul sebagai pembentuk identitas personal masing-masing pihak yang berkonflik. Manajemen rekonsiliasi harus didahului oleh analisa, dengan melakukan diagnosa terhadap konflik yang terjadi. Akar-akar konflik harus diidentifikasi secara jelas. Bentuk penyelesaian konflik bernuansa SARA di Kota Ambon sangat beragam semua itu oleh karena kesadaran semua pihak untuk menghentikan konflik dengan cara damai.

Kearifan lokal merupakan hasil proses dialektika antara individu dengan lingkungannya. Kearifan lokal merupakan respon individu terhadap kondisi lingkungannya. Secara individual, kearifan lokal muncul sebagai hasil dari proses kerja kognitif individu sebagai upaya menetapkan pilihan nilai-nilai yang dianggap paling tepat bagi mereka. Secara kelompok, kearifan lokal merupakan upaya menemukan nilai-nilai bersama sebagai akibat dari pola-pola hubungan yang telah tersusun dalam sebuah lingkungan.

Salah satu bentuk penyelesaian konflik SARA dengan menyisipkan nilai-nilai budaya yang telah melekat sejak dulu kala, dan menjadi ikatan persaudaraan orang Ambon dan Maluku umumnya. Bentuk penyelesaian konflik salah satunya dengan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Ambon yakni *pela gandong* mampu meredam konflik bernuansa SARA.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Chandra, Robby. 1992. *Konflik dalam kehidupan sehari-hari*. Yogyakarta: Kanisius
- Chilcote,Ronald.H. 2003.*Teori Perbandingan Politik “Penelusuran Paradigma”*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Giddens, Anthony. 1987. *Perdebatan Klasik dan Kontemporer Mengenai Kelompok, Kekuasaan dan Konflik*. Jakarta: Rajawali
- J. E.Lokollo.dkk. 1997, *Seri Budaya Pela-Gandong dari Pulau Ambon*, Ambon: Lembaga Kebudayaan Maluku
- Irawan,prasya. 2006. *Penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Jakarta: DIA FISIP UI
- Lampe, Muni. 2007. *Wawasan Sosial Budaya Bahari*. Makassar: Unhas
- Lapera. 2000. *Otonomi Versi Negara*. Yogyakarta: Lapera Pustaka.
- Maryaeni, M.P.D. 2005. *Metode Penelitian Kebudayaan*. Jakarta: PT Bumi aksara
- May Rudy,T. 2003. *Pengantar Ilmu Politik*.Bandung: PT Refika Aditama
- Muin, Ma'arif. 1999. *Manual Advokasi : Resolusi Konflik Etnik dan Agama* Surakarta:Ciscore
- Novaczek, Irene.dkk. 2001. *An Institutional Anaysis of Sasi Laut in Maluku, Indonesia. Malaysia: ICLARM*
- Ralahalu, Karel Albert. 2007. *Pembangunan Daerah Kepulauan Maluku dan Visi Maluku 2030*. Jakarta: Bintang Ilmu
- Rauf, Maswadi. 2000. *Konsensus Politik, sebuah panjajangan teoritis*. Jakarta: Dirjen Dikti
- Pattikayhatu, J. A. 2005. *Budaya Pela dan Gandong di Maluku Tengah*, Ambon
- Schulte Nordholt,Henk.dkk. 2009. *Politik lokal di Indonesia*. Jakarta: KITLV
- Surabakti,Ramlan.1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana
- SP, Varma. 2001. *Teori Politik Modern*. Jakarta : PT Raja Garfindo Persada
- Trijono,Lambang. 2001. *Keluar dari Kemelut Maluku*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Tri
- Prasya, Dr Joko,dkk. 1999. *Ilmu budaya dasar*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Wasistiono,Sadu,dkk. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: CV Fokusmedia
- Kota Ambon dalam Angka 2010, Badan Statistik Kota Ambon

Dokumen dan Arsip

- Dokumen Sejarah Pela Gandong Passo Batu Merah, Arsip Negeri Passo
- Dokumen sejarah *Pela “Sama-suru Amalatu[Ameth] Hua Resirehung [Ema]* yang di buat oleh panitia khusus Panas Pela. Paper “Budaya Pela dan Gandong di Maluku Tengah” oleh Prof. J. A. Pattikayhatu, 2005.
- Nurma Ali Ridwan. Landasan Keilmuan Kearifan Lokal. Jurnal studi Islam dan Budaya Vol. 5 | No. 1 | Jan-Jun 2007 |27-3
- Artikel Jhon Chr. Ruhlessin, *Etika Publik; Menggali tradisi pela dari pela di Maluku,2005*
- Artikel Perpustakaan Daerah Maluku, *Asal usul orang Ambon*, 2006
- Smith Alhadar, Kekerasan di Maluku:Produk Sejarah Kolonial. Republika 27 September 2007 (arsip perpustakaan daerah Maluku)
- Artikel “Batu Merah” Majalah Tifa edisi September-Oktober 1996 hal 14
- Profil Negeri Batu Merah, Data dari Pemerintahan Negeri Batu Merah
- Profil Negeri Passo, Data dari Pemerintahan Negeri Passo
- Arsip Struktur Saniri Raja Patti Negeri Passo,
- Perda Kota Ambon No 3 Tahun 2008

